BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sungguh tidak mudah membicarakan peranan agama --Islam-- dalam kancah politik di Indonesia. hal ini disebabkan karena unsur-unsur politik kita banyak diwarnai dan diperkaya oleh istilah SARA (suku, ras, agama dan antar golongan), sementara agama menempati peran yang paling peka diantara unsur lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa pembahasan agama dan kontribusinya terhadap negara adalah hal yang dicita-citakan, sejauh pembahasan tersebut tidak mengganggu stabilitas perpolitikan nasional.

Di Indonesia, gejala demikian tampak dalam setiap babakan sejarah, mulai permulaan abad ke 20, ketika nasionalisme Indonesia mulai terbentuk sampai saat ini, yakni terjadi pergumulan antara Islam dan negara. Hubungan antara Islam dan negara mengalami pasang surut. Fenomena ini dirangkum oleh Deliar Noer dalam tulisannya yang berbunyi, "Dalam sejarahnya, kedudukan dan peranan politik Islam di Indonesia mengalami proses pasang surut. Dan barang kali lebih banyak surutnya dari pada pasangnya. Ia pasang pada tiap permulaan zaman-zaman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keculai Demokrasi Terpimpin yang dimulai dan diakhiri dalam keadaan surut. sedangkan pada permulaan zaman lain (penjajahan Belanda, Demokrasi Parlementer dan orde baru) ia pasang untuk kemudian surut.[1]

Persoalan mendasar bagi pemerintah saat itu adalah bagaimana mengatasi birokrasi yang tidak bertanggung jawab dan kekuasaan otoriter warisan orde lama yang dianggap telah membawa kemerosotan parah bagi ekonomi rakyat.[2] Ada dua macam krisis yang melanda pemerintah diawal orde baru. Pertama, krisis dibidang ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi.[3] bahkan pada tahun 1966 laju inflasi mencapai 650 %. Kedua, krisis dibidang politik, terjadi ketidakstabilan karena pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam masyarakat.

Untuk mencari solusi dua permasalahan diatas, dibidang ekonomi, pemerintah Indonesia mengadakan sejumlah tindakan untuk mengatasi parahnya perekonomian

---

1. Deliar Noer, Islam dan Politik: Mayoritas dan Minoritas, Prisma no. 5 1988, hal. 3-21

2. M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim orde baru, Paramadina, Jakarta 1995, hal. 17

3. Drs. Abdul Aziz Thaba, MA. Islam dan Negara dalam Politik orde baru, Gema Insani Pers, Jakarta, 1996, hal. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional, terutama melalui pinjaman utang luar negeri. Alternatif ini dipilih, agaknya pemerintah orde baru tidak melihat cara lain untuk mengatasi kebobrokan ekonomi warisan orde lama kecuali dengan jalan pinjaman dari negara-negara Barat yang secara ekonomis saat itu sudah maju. Sementara dalam bidang politik. diupayakan menciptakan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi.[4]

Selain langkah diatas, upaya pemerintah orde baru adalah menggunakan birokrasi sebagai "Primum Mobile" atau penggerak utama program modernisasi dan pembangunan. Untuk itu diupayakan langkah-langkah kearah reformasi birokrasi dengan jalan [5]:

1. Mengalihkan wewenang pemerintah ketingkat birokrasi yang lebih tinggi, yakni pemusastan proses pembuatan kebijakan pemerintah.
2. Membuat birokrasi efektif dan tanggap pada perintah pimpinan pusat.
3. Memperluas wewenang pemerintah dan mengendalikan daerah-daerah.

ketiga langkah diatas, telah menciptakan birokrasi orde

---

4. Ibid hal 186

5. Op.cit halaman 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru yang kuat dan berporos pada eratnya hubungan ABRI dan tehnokrat (sipil).

Tetapi, hubungan yang erat antara ABRI dan tehnokrat telah melebarkan fungsi birokrasi orde baru sebagai mesin politik (Political Machine) untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat.[5]

Gagalnya rezim orde lama dalam membangun masyarakat membawa catatan sejarah tersendiri bagi rezim orde baru untuk dijadikan pengalaman agar keterbelakangan dalam segala aspek kehidupan tidak terjadi pada masa orde baru. Oleh karena itu salah satu alternatif yang digulirkan oleh pemerintah orde baru dalam rangka menciptakan pembangunan yang dicita-citakan adalah Modernisasi. Dan nampaknya, menjelang pergantian dasawarsa 60-an, modernisasi merupakan tema baru dalam konteks perubahan-perubahan sosial politik di Indonesia.[6]

Harapan pemerintah saat itu, agar kebijakan (policy) yang digulirkan mendapat dukungan dari rakyat dan negara barat selaku negara pendonor. Menariknya,

---

5. Syfi'i Anwar Op.cit halaman 18

6. M. Dawam Rahardjo, Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholis Madjid, kata Pengantar untuk buku Nurcholis Madid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan Bandung 1994, halaman 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harapan pemerintah saat itu terwujud karena memperoleh dukungan yang kuat dari ABRI dan tehnokrat (sipil), bahkan kalangan intelektual modernis sekuler ikut mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Dilain pihak, persoalan modernisasi adalah hal baru dikalangan Islam. Mereka berkeyakinan bahwa modernisasi adalah ideologi yang secara terang-terangan berkiblat pada Barat. Terhadap masalah ini, umat Islam dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, ikut berpartisipasi atau mendukung kebijakan rezim baru yang berarti mendukung modernisasi yang nyata-nyata berkiblat pada barat. Kedua, menolak dengan konsekuensi kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan yang sudah mendapat dukungan yang luas dari berbagai pihak, termasuk pihak diluar Islam.[7]

Dikalangan angkatan tua golongan modernis, terutama yang pernah menjadi fungsionaris dalam kepengurusan Masyumi, lebih menekankan repolitisasi Islam sebagai upaya menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah dengan mendesak pemerintah orde baru merehabilitasi Masyumi. Sedangkan kelompok yang lebih

---

7. M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim, Mizan Bandung 1993, hal 381 - 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda yang berada diluar kepengurusan Masyumi, cenderung memperjuangkan rehabilitasi material, artinya lebih tertarik untuk aktif berkecimpung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik orde baru. Bagi mereka ini, persoalan yang terpenting adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis.

Pada masa-masa ini, bisa kita lihat harapan dan upaya umat Islam untuk tampil kembali dalam politik nasional, terutama harapan untuk menampilkan Masyumi yang sempat dibubarkan oleh rezim orde lama.[8] Namun, upaya umat Islam untuk menampilkan kembali Masyumi di panggung politik nasional tidak berhasil, sebab diluar dugaan Partai Masyumi tidak direhabilitasi oleh orde baru.[9] Sebagai ganti didirikanlah Parmusi (Partai

---

8. Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan alasan,"...Berdasarkan moral revolusioner dan moralnya revolusi, maka penguasa wajib membasmi tiap-tiap kekuasaan asing ataupun tidak asing, pribumi ataupun tidak pribumi yang membahayakan keselamatan atau berlangsungnya politik," Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, 2 jilid (Jakarta, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964) 2 hal. 411, sebagaimana dikutip A. Syafi'i Ma'arif, Study tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegeraan, LP3ES, Jakarta 1985, hal.188

9. Fahri Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan Bandung 1986, hal. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslimin Indonesia) pada tanggal 7 April 1967, namun dengan kontrol yang ketat dari pemerintah mulai dari pembentukan sampai pada penyusunan pengurus, intervensi pemerintah sangat tinggi. Hal ini menimbulkan persoalan yang cukup berat bagi umat Islam, karena belum terdapat wadah sebagai penyalur aspirasi umat Islam. Sementara Parmusi pun belum bisa mandiri dan tidak siap menyongsong pemilu pertama dalam orde baru tahun 1971.

Dilaih pihak, terbentuknya wadah-wadah Islam seperti, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Serikat Islam Indonesia (PSII) tidak lagi mencerminkan aspirasi umat Islam secara keseluruhan, namun lebih banyak berjuang bagi kelompoknya.

Memasuki pemilu pertama orde baru pada tahun 1971, jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Islam 29%, dengan rincian NU 18,67%, Parmusi 7,36%, PSII 2,39% dan Perti 0,70%. Jumlah suara ini merosot jauh bila dibandingkan dengan perolehan suara umat Islam pada pemilu 1955, yang memperoleh suara keseluruhan 45,2%.[10]

Memasuki pemilu kedua orde baru tahun 1977, partai-partai Islam melebur (fusi) kedalam satu partai

---

10. Op-cit, hal. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengadakan peleburan partai pada tahun 1973, dengan alasan penyederhanaan partai sehingga mampu mempermudah kampanye. Jumlah suara yang diperoleh PPP saat itu adalah 29,2% sedangkan Golongan Karya 62,11% dan PDI 8,6%.[11]

Memasuki era 80-an, kondisi Partai Islam dihadapkan pada sebuah dilema yakni tetap memilih idiologi Islam yang berarti akan kehilangan satu-satunya partai Islam, karena pemerintah akan membubarkan OKP dan Parpol yang menggunakan azas Pancasila atau memilih idiologi Pancasila yang tentunya akan kehilangan identitas sebagai partai Islam. Pada masa ini diwarnai oleh adanya ketegangan konseptual.

Karena dihadapkan pada kondisi yang demikian, mau tidak mau PPP harus menerima kenyataan, menerima Pancasila sebagai azas dan harus pula kehilangan identitas. Lebih-lebih setelah dalam muktamar NU ke 27 di Situbondo, NU secara terang-terangan keluar dari unsur PPP. Artinya secara Organisatoris NU tidak terikat dengan Partai manapun, sehingga hal ini amat memberatkan bagi PPP setelah kehilangan basis terbesarnya. Dampak

---

11. Nasir Tamara, Sejarah Politik Islam Orde Baru, Prisma no. 5 1988, hal. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari fenomena diatas, yaitu semakin menurunnya perolehan suara PPP baik pada pemilu 1982 dengan suara 27,78 % maupun pemilu tahun 1987 dengan 15,97 % suara.

Fenomena diatas menandakan, bahwa kalau dulu (sebelum menerima Pancasila sebagai azas tunggal) PPP adalah satu-satunya wadah aspiratif umat Islam, namun setelah berlakunya azas tunggal, identitas PPP sudah tampak lagi, sebab semua parpol memiliki satu azas yang sama yaitu yaitu Pancasila. Artinya semua partai harus terbuka menerima semua golongan.

Oleh karena itu diperlukan wadah baru dalam berpartisipasi sebagai instrumen perjuangan aspirasi umat Islam. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa dilakukan lewat seminar-seminar, lobying, lokakarya maupun pers media.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah aspirasi umat Islam dapat tersalurkan pada masa orde baru ?
2. Bagaimana bentuk partisipasinya ?

C. PENEGASAN JUDUL

Dinamika : Sifat (Tabiat) yang bertenaga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkekuatan (sehingga selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan.[12]

Partisipasi: Hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikut sertaan; peran serta.[13]

Politik : Segala urusan dan tindakan (kebijaksanan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah sesuatu negara atau terhadap negara.[14]

Umat Islam : Para penganut sesuatu agama atau nabi, mis. -Islam, -Kristen.[15]

Masa : Kurun waktu dalam sejarah, sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting di dalam sejarah, masa.[16]

Orde baru : Sistem (pemerintahan dan sebagainya) peraturan (pemerintah) susunan angkatan, masa pemerintahan di Indonesia sejak

---

12. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta 1993, hal.251

13. Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, halaman 650

14. Ibid hal. 763

15. Ibid, halaman 1123

16. Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, hal. 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 11 Maret 1966

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Islam sebagai agama mayoritas sudah sewajarnya kalau umat Islampun ikut menentukan dan mengambil kebijakan negara. Karenanya dibutuhkan partisipasi umat Islam dalam lembaga-lembaga politik formal sebagai representatif posisi umat Islam
2. Sebagai umat yang mayoritas di Indonesia, umat islam seharusnya dalam memainkan perannya menjadi kelompok yang dominan, bukan sebagai kelompok yang direkayasa.

E. TUJUAN PENULISAN

1. Agar umat Isam Indonesia dapat menemukan format yang ideal dari partisipasi poltik di Indonesia saat ini dan masa mendatang, khususnya menyongsong pembangunan jangka panjang tahap ke dua, dimana konstalasi politik akan selalu mengalami perubahan

2. Ingin mengetahui sejauh mana peran umat Islam dalam knstalasi politik Indonesia, sebab dalam realitasnya kitya selalu mendapat posisi marginal ditengah percaturan politik bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. SUMBER YANG DIGUNAKAN

Sumber yang kami gunakan adalah buku / literatur, tulisan dikoran, majalah serta makalah-makalah yang ada kaitannya dengan tulisan yang kami buat.

G. METHODE DAN SASTEMATIKA PEMBAHASAN

1. Metodelogi Pembahasan

1.1. Methode Historis, yaitu penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara cukup teliti dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber tersebut.[18]

1.2. Methode deskriptif analitik, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyrakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan pengaruh-pengaruhdari suatu fenomena.[19] Kemudian dianalisa untuk mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan tersebut.

---

18. M. Nazir, Ph.D, Methode Penelitian, Ghalis Indonesia, cet. III, 1988, hal. 55-56

19. Ibid hal. 63-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Penegasan Judul

D. Alasan Memilih Judul

E. Tujuan Penulisan

F. Sumber Yang Digunakan

G. Methode Dan Sistematika Pembahasan

BAB II ISLAM DAN KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU

A. Sekilas Tentang Orde Baru

B. Format Kebijakan Baru Politik Indonesia

C. Sikap Umat Islam Terhadap Kebijakan Orde Baru

D. Gagalnya Rehabilitasi Masyumi Dan Terbentuknya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

E. Partai-partai Islam pada masa pemerintahan orde baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN

BAB III PARTAI POLITIK ISLAM DALAM KONSTELASI POLITIK ORDE BARU

A. Peleburan Partai Politik Islam

B. PPP dan Aspirasi Umat Islam

C. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas PPP dan Implikasinya

BAB IV ARAH BARU PARTISIPASI POLITIK UMAT ISLAM

A. Diversifikasi Partisipasi Umat Islam

B. Perspektif Baru yang Didambakan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran-saran dan Penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id